



## **Efektivitas Program Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi Kabupaten Kolaka**

<b><u>INFO PENULIS</u></b>	<b><u>INFO ARTIKEL</u></b>
<p>Hajerah N.Safitri Universitas Sembilanbelas November Kolaka Indonesia <a href="mailto:ajrasafitri@gmail.com">ajrasafitri@gmail.com</a></p> <p>Arafat Mallapiseng Universitas Sembilanbelas November Kolaka Indonesia <a href="mailto:afatpascaunm@gmail.com">afatpascaunm@gmail.com</a></p> <p>Sudirman Baso Universitas Sembilanbelas November Kolaka Indonesia <a href="mailto:dd.baso2018@gmail.com">dd.baso2018@gmail.com</a></p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 1, April 2025 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a></p>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Safitri, H. N., Mallapiseng, A., & Baso, S., (2025). Efektivitas Program Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi Kabupaten Kolaka. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5 (1), 323-333.

### **Abstrak**

Artikel ini merupakan luaran dari penelitian yang membahas permasalahan tentang prosedur, mekanisme, dan syarat dalam pelaksanaan program pengentasan pemukiman kumuh terpadu (PPKT) di kelurahan Anaiwoi kabupaten Kolaka. Penelitian ini bertujuan mengukur efektivitas Program PPKT dengan menggunakan indikator pengukuran efektifitas program yang dikemukakan oleh Campbell. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data mengikuti model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dengan tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (verifikasi data). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program PPKT sudah cukup efektif namun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan agar hasil pelaksanaan program ini lebih optimal, seperti pada indikator keberhasilan program, ditemukan hambatan dalam tahap sosialisasi, seperti jeda waktu yang terlalu lama antara sosialisasi dan pelaksanaan program, yang menyebabkan rendahnya partisipasi serta pemahaman masyarakat terkait mekanisme program. Kemudian pada indikator keberhasilan sasaran juga masih menghadapi kesulitan dalam mencapai target, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sementara itu, indikator kepuasan program dinilai cukup efektif, tetapi masih terdapat keluhan dari penerima manfaat terkait kualitas material bangunan yang perlu ditingkatkan.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Pengentasan, Program PPKT, Pemukiman Kumuh

### Abstract

This article is the output of research which discusses problems regarding procedures, mechanisms and conditions in implementing the integrated slum eradication program (PPKT) in Anaiwoi sub-district, Kolaka district. This research aims to measure the effectiveness of the PPKT Program using indicators for measuring program effectiveness proposed by Campbell. This research is classified as descriptive research using a qualitative approach. The data analysis technique follows the model proposed by Miles and Huberman with stages, namely data reduction, data presentation, drawing conclusions (data verification). The results show of that research in the implementation of the PPKT program there are still several things that need to be improved so that the results of implementing this program are more optimal, such as in the program success indicators, obstacles were found in the socialization stage, such as too long a time lag between socialization and program implementation, which caused low participation and public understanding regarding the program mechanisms. Then, in terms of target success indicators, there are still difficulties in achieving the target, especially for Low Income Communities (MBR). Meanwhile, the program satisfaction indicators are considered quite effective, but there are still complaints from beneficiaries regarding the quality of building materials that need to be improved.

**Keywords:** Effectiveness, PPKT Program, Slum Settlements

### A. Pendahuluan

Undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, menjelaskan bahwa pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena tidak teratur tata letak bangunan, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat, sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian

Dalam suatu kota yang memiliki angka pertumbuhan penduduk yang pesat kemudian tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi tentunya akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, salah satunya mengenai pemukiman dimana kemampuan untuk membangun pemukiman yang memenuhi syarat menjadi terbatas sehingga mengakibatkan pemukiman yang tidak layak atau kumuh. Terdapat faktor yang mempengaruhi keberadaan kawasan pemukiman kumuh, yaitu faktor urbanisasi, faktor sarana prasarana, faktor sosial ekonomi, faktor tata ruang faktor lahan perkotaan (Krisandriyana *et al.*, 2019). Terjadinya pertambahan jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya jumlah kebutuhan pemukiman yang semakin besar pula. Semakin tinggi kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan tempat tinggal, maka semakin tinggi pula ancaman penurunan kualitas perkotaan yang akan dihadapi oleh daerah perkotaan, karena kota merupakan daerah yang sangat dinamis dimana penduduknya akan terus mengalami pertumbuhan dan peningkatan setiap harinya (Hendariwati *et al.*, 2021).

Munculnya perumahan-perumahan yang sudah tidak layak huni merupakan salah satu hal yang berkaitan langsung pada perkembangan fisik kota, yang dicirikan dengan kondisi infrastruktur dan sanitasi lingkungan yang buruk, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi namun memiliki kualitas yang rendah, kurangnya RTH, serta kondisi sosial, ekonomi dan politik yang rendah (Araujo *et al.*, 2023). Munculnya masalah perumahan dan pemukiman ini disebabkan, karena: (1) Kurang terkendalinya pembangunan perumahan dan pemukiman sehingga menyebabkan munculnya kawasan kumuh pada beberapa bagian kota yang berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan. (2) Keterbatasan kemampuan dan kapasitas dalam penyediaan perumahan dan pemukiman yang layak huni baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. (3) Pembangunan sumberdaya manusia dan kelembagaan masyarakat yang masih belum optimal khususnya menyangkut kesadaran akan pentingnya hidup sehat. (4) Kurang dipahaminya kriteria teknis pemanfaatan lahan pemukiman dan perumahan khususnya yang berbasis pada ambang batas daya dukung lingkungan dan daya tampung ruang (Mardiansyah & Adisti, 2020).

Proses Implementasi kebijakan dalam hal ini undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, diturunkan menjadi program (PPKT) melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh yang merupakan salah satu upaya nyata dalam mengatasi pemukiman kumuh di Indonesia melibatkan langkah-langkah yang kompleks dalam menterjemahkannya menjadi tindakan-tindakan nyata meliputi; perencanaan implementasi, koordinasi dan kolaborasi, alokasi sumber daya, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyesuaian dan perbaikan (Arafat, 2023.)

Terdapat beberapa upaya untuk mengatasi permukiman kumuh, salah satunya program (PPKT) melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh yang merupakan salah satu upaya nyata dalam mengatasi permukiman kumuh di Indonesia. Program ini dilakukan melalui kegiatan pembangunan perumahan baru serta pemugaran atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman layak huni. Sasaran dari program ini adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman disebutkan pada Pasal 1, Angka 24 disebutkan bahwa Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Selanjutnya dijelaskan pula pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh. Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh pasal 19 ayat 1 Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung mencakup: (a) ketidakteraturan bangunan; (b) tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau (c) kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat. Dan pada 27 ayat 2 kriteria atau Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari: (a) di atas air; (b) di tepi air; (c) di dataran rendah; (d) di perbukitan; dan/atau (e) di daerah rawan bencana.

Telah banyak penelitian tentang program pengentasan permukiman kumuh terpadu seperti penelitian tentang efektivitas program KOTAKU dalam mengurangi luasan permukiman kumuh serta faktor pendukung dan penghambat efektivitas program KOTAKU dalam mengurangi luasan permukiman kumuh di desa Sruni kecamatan Gedangan kabupaten Sidoarjo oleh Anton Widodo dan Ahmad Riyadh UB (2023), yang menggunakan indikator pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Siagian yakni; (a) Kejelasan tujuan program; (b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan program; (c) Proses analisis dan perumusan kebijakan program yang mantap; (d) Perencanaan yang matang; (e) Penyusunan program yang tepat; (f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja; (g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien; (h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik. Hasil yang ditemukan adalah bahwa pelaksanaan program KOTAKU sudah efektif sesuai indikator yang dijadikan basis analisis dalam penelitian ini (Widodo & UB, 2023).

Selanjutnya penelitian tentang efektivitas Program Tulungagung Layak Huni dalam Pemerataan Penanganan Kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung oleh Gladysa Venanda Artita et al.(2024), penelitian ini menyatakan bahwa penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung yang belum optimal, dengan pendekatan top-down, kurangnya regulasi, transparansi, dan kebutuhan database kawasan kumuh untuk pemerataan penanganan(Artita et al., 2024)

Kecamatan Tanggetada merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Kolaka dengan luas wilayah 267,64 Km<sup>2</sup>. Berdasarkan surat keputusan Bupati Kolaka nomor 188.45/352/2020 tentang lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di kabupaten Kolaka sebesar 400,76 hektar yang terbagi dalam 12 kecamatan, 38 desa/kelurahan. Kelurahan Anaiwoi sendiri memiliki total area yang berkriteria kumuh seluas 18,10 hektar, yang identik dengan nama Kampung Bajo, yang merupakan daerah pesisir yang menjadi salah satu lokasi kawasan kumuh dan berada pada lahan legal dan memiliki tipologi bangunan berada diatas air dan ditepi air serta memiliki kondisi yang masih terpinggirkan jika dibandingkan dengan desa lain yang berada di Kecamatan Tanggetada.

**Tabel 1. Daftar Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Kolaka**

Kawasan		Lingkup Administrasi			Kekumuhan	Prioritas	
Nama	Luas (Ha)	Lokasi	LK/RW	Kel/Desa	Kecamatan		Tingkat
Watubangga	6,43	6,43	LK II, IV	Watubangga	Watubangga	Ringan	C6/9
Anaiwol-	16,8	15,19	LK	Anaiwoi	Tanggetada	Sedang	B2/2

Kawasan		Lingkup Administrasi				Kekumuhan	Prioritas
Nama	Luas (Ha)	Lokasi	LK/RW	Kel/Desa	Kecamatan	Tingkat	
			II,IV				
Oneha		1,61	LKII LK	Oneha	Tanggetada	Ringan	C1/3
Tambea	5,20	5,20	II,III	Tambea	Fondada	Ringan	C1/3
Hakatutobu	2,56	2,56	LKI,III LK	Hakatutobu	Pomalaa	Ringan	C4/6
Pelambua	3	15,23	I,II,IV	Pelambua	Pomalaa	Ringan	C2/3
Dawi-Dawi	5	18,65	RW II	Dawi- Dawi	Pomalaa	Ringan	C3/6
Tonggoni	0	16,70	RW I	Tonggoni	Pomalaa	Ringan	C3/6
		1,91	LK II	Bende	Wundulako	Ringan	C1/3
		4,18	LKII,III	Unamendaa	Wundulako	Ringan	C1/3
Bende- Ngapa		11,50	RW I	Lamekongg a	Wundulako	Ringan	C3/6
	26,5	7	RW IV.V	Ngapa	Wundulako	Ringan	C1/3
Silea- Tikonu-		6,53	LKII,III	Tikonu	Wundulako	Ringan	C2/3
Kowioha	19,1	7	RW I,IV	Silea	Wundulako	Ringan	C2/3

Sumber : Dinas PKP Kabupaten Kolaka 2024

Pada tahun anggaran 2023 kabupaten Kolaka berhasil mendapatkan Program Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu (DAK Integrasi) kawasan Anaiwoi Kampung Bajo tahun anggaran 2023, yang secara nasional hanya 13 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Program PPKT yang dilaksanakan di kelurahan Anaiwoi khususnya di kawasan pemukiman kampung Bajo menetapkan tujuan, kampung kumuh menjadi kampung yang asri yang dalam bahasa Bajo disebut "Kampoh Malasso". Program pembangunan Kampoh Malasso mulai dilaksanakan pada tanggal 5 Januari tahun 2023 dan selesai di bulan Desember tahun 2023 (Mariani, 2023). Hasil observasi awal ditemukan fakta bahwa dalam pelaksanaan program ini sebelumnya ditemukan beberapa permasalahan seperti tidak adanya sosialisasi dari pemerintah ke masyarakat mengenai pelaksanaan program Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu (PPKT) terkait mekanisme serta syarat yang ditentukan atau ditetapkan sebagai penerima program sehingga program tersebut tidak tepat sasaran dimana adanya masyarakat penerima program yang tidak tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), kemudian masih adanya rumah yang belum rampung namun sudah di tempati karena anggaran pembangunan yang tidak mencukupi sehingga masyarakat untuk mengantisipasi menggunakan dana pribadi serta di temukannya masyarakat yang memperdagangkan atau menjual rumah bantuan tersebut.

Dari hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya tersebut yang mendasari penelitian ini dalam rangka mengetahui apakah program PPKT yang dilaksanakan di kelurahan Anaiwoi telah berjalan efektif. Efektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan/kesuksesan dalam melakukan tugas-tugas sesuai dengan perencanaannya, baik dilakukan atas nama perorangan, organisasi maupun lembaga / instansi, yang dalam pelaksanaannya didukung oleh tenaga profesional, berpengalaman dan memiliki pengetahuan serta dana yang memadai. Dalam perkembangan selanjutnya, efektivitas menjadi isu sentral baik secara implisit maupun eksplisit, dalam semua pekerjaan pakar dan peneliti yang melakukan kajian tentang organisasi. Karena efektifitas sesuatu dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan sesuatu pekerjaan maupun keadaan (Mesiono, 2018).

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai efek, pengaruh, atau akibat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, efektif berarti dapat membawa hasil, berhasil guna, manjur atau mujarab (akibat, pengaruhnya, kesannya). Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya (Panni & Hidayat, 2024). Menurut Mahmudi, efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. (Hertati, 2020) Efektivitas menggambarkan seluruh input, proses dan output yang mengacuh pada hasil guna dari pada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan

sejauh mana (kualitas, kuantitas dan waktu) telah dicapai. Oleh karena itu suatu organisasi program dan kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana dan dapat memberikan dampak, hasil atau manfaat yang diinginkan.

Penelitian ini menggunakan indikator pengukuran efektivitas menurut Cambel J.P (Smith, 2016) Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah; (a) Keberhasilan program, (b) Keberhasilan sasaran, (c) Kepuasan terhadap program, (d) Tingkat input dan output, (e) Pencapaian tujuan menyeluruh.

## **B. Metodologi**

Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah pelaksanaan program (PPKT) Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu pada Pemukiman Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi. Penelitian ini bertujuan mengukur efektivitas Program PPKT dengan menggunakan indikator pengukuran efektifitas program yang dikemukakan oleh Campbell. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif mengacu pada metodologi yang digunakan untuk memahami fenomena manusia dari perspektif yang mendalam, kompleks, dan kontekstual (Harahap K. et.al., 2024). Sumber Data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang di peroleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama) melalui kuesioner, kelompok fokus, panel, dan data dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang di peroleh peneliti dari data yang sudah ada melalui catatan atau dokumentasi dan data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan (Nurdin & Hartati, 2019) Sebagai Berikut : (1) Observasi Atau Pengamatan adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan, (2) Wawancara atau interview adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. (3) Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data melalui meliputi buku - buku yang relevan, peraturan - peraturan, laporan kegiatan, foto, film documenter, data yang relevan penelitian. Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Berdasarkan Pendapat Miles & Huberman dalam (Nurdin & Hartati, 2019). Teknik analisis data mengikuti model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dengan tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (verifikasi data).

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Untuk mengukur efektivitas program Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu (PPKT) di kelurahan Anaiwoi kabupaten Kolaka, peneliti menggunakan konsep teori yang dikemukakan oleh Campbell J.P yang memuat lima indikator pengukuran yang saling berhubungan satu sama lain yaitu; keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, serta pencapaian tujuan menyeluruh.

### **1. Keberhasilan Program.**

Dalam penelitian ini untuk melihat keberhasilan program dilakukan dengan menganalisis proses dan mekanisme pelaksanaannya yang merujuk pada SOP (Standar Operasional Prosedur) program PPKT berdasarkan Permen PUPR nomor 5 tahun 2022 tentang petunjuk operasional pengelolaan dana alokasi khusus fisik Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun anggaran 2022 yang meliputi;

- a. Tahap Prakonstruksi meliputi; sosialisasi kepada calon penerima bantuan, penyusunan program fisik dan non fisik, dan desain program fisik
- b. Tahap Konstruksi meliputi; persiapan pelaksanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan dan pengendalian konstruksi.
- c. Tahap serah terima konstruksi meliputi; Provisional Hand Over (PHO), Final Hand Over (FHO), dan serah terima akhir
- d. Tahap pasca konstruksi yang meliputi; pembentukan kelompok pemeliharaan dan Pemanfaatan (KPP), pelatihan anggota KPP, pendampingan instansi terkaite ekonomi dan social,

Keberhasilan program dalam mengentaskan permukiman kumuh dapat dicapai dengan menjalankan program sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari terwujudnya rumah layak huni bagi masyarakat Kampung Bajo. Keberhasilan program dapat ditinjau dari proses dan mekanisme suatu kegiatan yang dilakukan di lapangan. Apabila program dijalankan sesuai dengan mekanisme dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka program ini dapat dikatakan berhasil.

Gambar 4. 1 Kegiatan sosialisasi program PPKT di kantor lurah Anaiwoi



Sumber: Arsip Dinas PKP 2024

Adapun proses dan mekanisme yang pertama dilakukan adalah proses sosialisasi. Pemberian sosialisasi program merujuk pada proses penyampaian informasi dan pemahaman mengenai program PPKT kepada masyarakat agar masyarakat memahami dan mengerti maksud tujuan dan mekanisme program. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di dampingi TFL (Tenaga Fasilitator Lapangan) bersama pemerintah kelurahan yang dilakukan di kantor kelurahan Anaiwoi agar masyarakat memahami dan mengerti maksud dan tujuan pemberian program.

Namun pada tahapan sosialisasi yang dilakukan belum efektif karena terdapat jeda waktu yang terlalu lama antara sosialisasi dan pelaksanaan program, sehingga menimbulkan keraguan di masyarakat terhadap keberlanjutan program PPKT. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat, terutama dalam pengumpulan berkas. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program PPKT menyebabkan terjadinya kesalahpahaman. faktor yang penyebab kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program PPKT ini adalah sumber daya manusia masyarakat yang memang rendah serta kurangnya intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh dinas PKP kepada masyarakat.

Hasil temuan yang dijelaskan di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Panni et al (Panni & Hidayat, 2024) yang menyatakan kurangnya pemahaman masyarakat di Kelurahan Sea dan Kelurahan Kolakaasi kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka akan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dikarenakan faktor sumber daya manusia dan prasarana. Namun hal ini bukan menjadi faktor yang utama, akan tetapi kurang optimalnya sosialisasi dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta ketua BKM sebagai koordinasi pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, program PPKT di Kampung Bajo kelurahan Anaiwoi kabupaten Kolaka telah melaksanakan program sesuai SOP meskipun dalam tahap sosialisasi masih kurang optimal. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa program PPKT di Kampung Bajo cukup baik namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan sehingga belum optimal.

## 2. Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan sasaran merupakan pengukuran efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, jadi keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan. Artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat sasaran dalam program atau Kebijakan dari pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mutmainah & Husaini, 2024).

Dasar kebijakan dari program PPKT adalah Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang terdiri dari 8 aspek dan 16 kriteria permukiman kumuh sebagai berikut ;

- a. Kondisi bangunan gedung dengan kriteria; ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tatar uang, dan atau/ kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
- b. Kondisi jalan lingkungan dengan kriteria; jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman, dan atau/kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk
- c. Kondisi penyediaan air minum dengan kriteria; akses aman air minum tidak tersedia, dan atau/kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.

- d. Kondisi drainase lingkungan dengan kriteria: drainase lingkungan tidak tersedia, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan, dan atau/kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
- e. Kondisi pengelolaan air limbah dengan kriteria; sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi syarat teknis, dan atau/prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis
- f. Kondisi pengelolaan persampahan dengan kriteria; prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
- g. Proteksi kebakaran dengan kriteria; kondisi pengamanan/proteksi kebakaran tidak tersedia, dan sarana proteksi tidak tersedia.
- h. Dan sebagai aspek tambahan, yaitu ketersediaan Ruang Terbuka Publik.

Program ini bertujuan untuk mengatasi permukiman kumuh secara menyeluruh, dengan memperbaiki kualitas permukiman dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kesesuaian antara program PPKT dan regulasi yang berlaku menjadi faktor utama dalam memastikan bahwa pelaksanaan program dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kesesuaian antara program PPKT di Kampung Bajo kelurahan Anaiwoi kabupaten Kolaka dan permen PUPR No. 14/PRT/M/2018 mengenai pemenuhan kriteria pemukiman kumuh dalam mengatasi permukiman kumuh di Kampung Bajo kelurahan Anaiwoi kabupaten Kolaka sehingga program tersebut tepat sasaran kemudian sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang di alami masyarakat Kampung Bajo. Hal ini dapat dilihat dari output yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kampung Bajo yakni rumah layak huni dan akses infrastruktur yang lebih baik yang diperuntukkan untuk MBR sesuai dengan teori Campbell dalam Smith (2016) bahwa efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output, artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara salah seorang warga ibu R 32<sup>th</sup> selaku masyarakat Kampung Bajo/KPB (Kelompok Penerima Bantuan) menyatakan bahwa program ini sudah tepat sasaran karena masyarakat Kampung Bajo masih banyak yang belum mempunyai rumah atau masih numpang di rumah orang tuanya, sebab dalam satu rumah ada 3 KK, maka masyarakat seperti itu yang diusulkan untuk melakukan pemecahan KK untuk bisa diusulkan menerima bantuan namun pada saat pelaksanaan banyak masyarakat yang lambat atau masa bodo mengurus berkas pada saat pendataan sehingga tidak mendapat bantuan, kemudian untuk pembangunan itu di targetkan untuk selsai pada akhir tahun 2023 tapi karena ada masyarakat yang tidak mau berswadaya jadi pada saat peresmian itu masih ada yang belum rampung rumahnya" (Wawancara 30 Oktober 2024).

### **3. Kepuasan Terhadap Program.**

Menurut Campbell kepuasan merupakan salah satu kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan penerima program tersebut. Kepuasan dirasakan oleh para penerima terhadap kualitas program yang diterima. Semakin berkualitas program yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh penerima semakin tinggi, maka dapat menimbulkan penilaian yang baik terhadap pembuat dan pelaksana program. Dalam penelitian ini untuk menilai kepuasan terhadap program berfokus pada manfaat yang dirasakan masyarakat Kampung Bajo dan pemerintah kelurahan Anaiwoi dengan adanya program Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu (PPKT). Berdasarkan hasil penelitian indikator kepuasan terhadap program menunjukkan cukup efektif dimana program pengentasan pemukiman kumuh terpadu (PPKT) di Kampung Bajo memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safrizal et al (Safrizal et al., 2021) menunjukkan bahwa program pengentasan pemukiman kumuh efektif dalam mengurangi area permukiman kumuh dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan kualitas layanan dan infrastruktur yang diberikan oleh program ini berkontribusi pada kepuasan penerima manfaat.

Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara dengan bapak M 39<sup>th</sup> selaku masyarakat penerima program, beliau mengatakan program PPKT sangat-sangat membantu, terutama di perkampungan yang dikategorikan wilayah kumuh seperti kampung bajo, Alhamdulillah dengan adanya program PPKT ini, terutama jalan, kemudian sebagian rumah direhab, bahkan ada juga yang dapat rumah bantuan, dan fasilitas lainnya, sangat banyak manfaat yang bisa kami rasakan terutama kami yang berdagang, akses jalan untuk masuk ke rumah kami itu sudah bagus kemudian sudah bisa masuk kendaraan bermotor melihat dagangan kami sehingga terjadi siklus perputaran ekonomi di tempat kami" (Wawancara 1 Oktober 2024).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa indikator kepuasan terhadap program dalam hal ini kepuasan masyarakat Kampung Bajo terhadap program PPKT cukup efektif, karena program PPKT ini memberikan banyak dampak positif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kampung Bajo di kelurahan Anaiwoi kabupaten Kolaka. Meskipun masih ada kekurangan yang menyebabkan beberapa masyarakat kurang puas namun secara umum kepuasan terhadap program PPKT di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka sudah cukup efektif.

#### 4. Tingkat Input dan Output

Menurut Campbell pada indikator input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output). Jika Output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input lebih besar dari output maka dapat dikatakan tidak efisien. Aspek Tingkat Input dan Output adalah sebuah proses permulaan program dan keluarannya sebagaimana telah direncanakan sesuai dengan prosedur awal program ini dibuat

Program PPKT sendiri dalam proses awalnya dimulai dengan cek lokasi kemudian Dinas PKP bersama pemerintah daerah mempersiapkan dokumen persyaratan dari program PPKT seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 tentang Petunjuk operasional pengelolaan dana alokasi khusus fisik infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun anggaran 2022 yang merupakan input dari program Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu (PPKT) di Kampung Bajo kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada kabupaten Kolaka karena sebagai dasar pelaksanaan program meliputi:

- 1) Surat Usulan ditujukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dan ditandatangani oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai calon Penerima DAK Fisik Rumah Khusus.
- 2) Proposal berisikan gambaran umum; (a) gambaran umum calon penerima DAK Fisik Rumah Khusus dan penghuni Rumah Khusus, (b) profil lokasi usulan dan kondisi eksisting, (c) rencana pengelolaan, pengembangan lokasi, dan pemberdayaan penerima manfaat Rumah Khusus, dan (d) potensi output yang dihasilkan, output, dampak yang ditimbulkan, serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Surat Keterangan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Kota;
- 4) Surat Keterangan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Kota;
- 5) Keputusan Penetapan Calon Penghuni Rumah Khusus berdasarkan penerima manfaat yang telah disepakati;
- 6) Bukti Legalitas Kepemilikan Hak Atas Tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; dan, Dokumen Perencanaan Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rumah khusus. Dokumen perencanaan teknis dapat mengacu pada prototipe desain yang dikeluarkan oleh Direktorat Rumah Khusus.

**Tabel 2. Jumlah Bantuan Dan Anggaran Program Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu (PPKT) Di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi Kabupaten Kolaka**

No	Jenis Bantuan	Volume	Anggaran
1	Pembangunan Baru (PB)	118	Rp. 50.000.000/Unit
2	Peningkatan Kualitas (PK)	122	Rp. 20.000.000/Unit

Sumber: Dinas PKP Kabupaten Kolaka 2024

Adapun output yang dihasilkan Program Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu (PPKT) Di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka adalah rumah layak huni, sehingga berhasil mencapai tujuan untuk mengurangi luas pemukiman kumuh di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka yang memenuhi kriteria rumah layak huni berdasarkan Permenpur RI No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dimaksud dengan Rumah Layak Huni (RLH) adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Kriteria Rumah Layak Huni harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut, yakni :

1. Keselamatan bangunan meliputi: struktur bawah/pondasi; struktur tengah/kolom dan balok dan struktur atas
2. Kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan, dan sanitasi.
3. Kecukupan luas minimum 7,2 m<sup>2</sup> - 12 m<sup>2</sup>/orang

4. Tidak menghilangkan penggunaan teknologi dan bahan bangunan daerah setempat sesuai kearifan lokal daerah untuk menggunakan teknologi dan bahan bangunan dalam membangun kriteria rumah layak huni.

Seperti yang di sampaikan oleh ibu D 36<sup>th</sup> selaku masyarakat penerima program, “Sejak adanya program ini dijalankan, saya merasakan banyak sekali perubahan positif. Salah satunya itu adalah perbaikan infrastruktur, seperti jalan yang dulunya rusak parah sekarang sudah diperbaiki dan bisa dilalui dengan nyaman. Selain itu, kami warga kampung bajo juga diberikan pelatihan tentang cara hidup bersih, sehingga pemukiman kami tidak kumuh lagi kemudian jauh lebih bersih dan sehat” (Wawancara 1 Oktober 2024).

Berdasarkan hasil uraian di atas maka dapat dijelaskan bahwa indikator input dan output menunjukkan sudah efektif, output yang dihasilkan sesuai dengan input yang dilakukan dan sesuai dengan prosedur sehingga program PPKT tersebut berhasil mencapai tujuan yakni mengentaskan pemukiman kumuh di Kampung Bajo. Input dalam penelitian ini merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 tentang petunjuk operasional pengelolaan dana alokasi khusus fisik infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun Anggaran 2022 sebagai dasar pelaksanaan program, anggaran, dan sumber daya.

Adapun output yang di hasilkan adalah peningkatan kualitas hunian di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka. Hal ini sesuai dengan teori Campbell dalam Smith (2016) bahwa efektivitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output). Jika Output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input lebih besar dari output maka dapat dikatakan tidak efisien. Output yang dihasilkan dari Program PPKT ini adalah rumah layak huni sehingga berhasil mencapai tujuan untuk mengurangi luas pemukiman kumuh di Kampung Bajo kelurahan Anaiwoi kabupaten Kolaka. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Oktuwar et al., ( 2021), bahwa implementasi program di 9 kelurahan mencapai tingkat efektivitas sebesar 86%, yang ditunjukkan melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Berdasarkan Uraian di atas dapat disimpulkan indikator tingkat input dan output sudah efektif karena output Program PPKT di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka yang dihasilkan lebih besar dari input.

### 5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Indikator pengukuran efektivitas yang terakhir yaitu pencapaian tujuan menyeluruh. Menurut Campbell J.P. pencapaian dari indikator ini dapat dilihat dari sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Dalam penelitian ini pencapaian tujuan program diukur berdasarkan undang-undang nomor. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 97 dan 99. Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban pemerintah untuk menata dan memperbaiki kawasan permukiman kumuh, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak dan target capaian program yaitu pengentasan permukiman kumuh menjadi 0 persen :

Secara garis besar pencapaian tujuan diukur sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan.
2. Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayananyang lebih baik.
3. Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan dipermukiman kumuh.
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh.

**Tabel 3. Presentase Keberhasilan Program Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu (PPKT) Di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi Kabupaten Kolaka**

Kategori	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Persentase Keberhasilan
Ketidakteraturan Bangunan	224 unit	121 unit	118 unit	97.52%
Ketidaksesuaian Bangunan	149 unit	137 unit	122 unit	89.05%

Sumber: Dinas PKP Kabupaten Kolaka 2024

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa program penanganan permukiman kumuh telah mencapai keberhasilan. Hal ini terlihat dari persentase keberhasilan yang tinggi pada kedua kategori ketidakteraturan bangunan. Program ini berhasil mengurangi jumlah bangunan yang tidak teratur dan tidak sesuai standar, sehingga diharapkan dapat mengurangi luas wilayah kumuh dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi Kabupaten Kolaka. Seperti halnya yang disampaikan oleh pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam hal ini Bapak AY 46<sup>th</sup> selaku Kepala bidang Kawasan Permukiman mengatakan "Target kami itu program PPKT ini pembangunannya bisa selesai pada akhir tahun 2023 jadi keberhasilan program ini bagi kami cukup memuaskan karena dari segi perencanaan itu semua berjalan sesuai time schedule dan dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu sebelum akhir 2023. Bahkan kampung Bajo Anewoi ini adalah merupakan, salah satu kegiatan DAK, PPKT yang menjadi pilot project atau menjadi contoh di seluruh Indonesia. Program ini berhasil mengurangi pemukiman kumuh dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sana jadi bisa dikatakan program ini sangat berhasil" (Wawancara 26 September 2024).

Program PPKT ini tidak hanya berhasil menyelesaikan pembangunan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, tetapi juga telah mengurangi luas pemukiman dalam penanganan indikator kekumuhan. Selain itu, masyarakat merasakan manfaat yang nyata, seperti peningkatan dan kualitas hidup masyarakat Kampung Bajo kelurahan Anaiwoi kecamatan Tanggetada kabupaten Kolaka. Hal ini sesuai dengan teori Campbell dalam Smith (2016) bahwa pengukuran efektivitas melalui indikator pencapaian tujuan menyeluruh bisa diukur dari sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Agar program dapat dirasakan manfaatnya dan berkelanjutan, pemerintah kelurahan Anaiwoi memberdayakan masyarakat untuk menjaga kebersihan dan memelihara fasilitas yang telah dibangun. Pemberdayaan dilakukan melalui sosialisasi mengenai hidup sehat, serta pembentukan kelompok pemeliharaan dan pemanfaatan (KPP) yang bertanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas. Dengan keterlibatan masyarakat, program tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kelurahan, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran kolektif untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Panni et al (2024) yang menyatakan bahwa Program Kota Tanpa Kumuh telah menunjukkan efektivitasnya dalam mencapai tujuan melalui pelaksanaan tugas yang baik dan fokus pada hasil nyata serta pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan indikator pencapaian tujuan menyeluruh sudah efektif karena para pelaksana Program PPKT di Kampung Bajo kelurahan Anaiwoi kecamatan Tanggetada kabupaten Kolaka menjalankan tugasnya dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan program dalam mengurangi luas wilayah pemukiman kumuh di Kampung Bajo Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas program Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu (PPKT) di Kampung Bajo, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, dapat disimpulkan sudah berjalan cukup baik, hanya saja ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan karena masih berjalan belum optimal karena permasalahan-permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan program. Dari 5 aspek yang diteliti, 2 diantaranya sudah berjalan dengan efektif yakni aspek tingkat input dan output dan aspek pencapaian tujuan secara menyeluruh. Untuk 3 aspek yang lain, yakni aspek keberhasilan program sudah cukup baik namun kendala dalam tahap sosialisasi, seperti jeda waktu yang terlalu lama antara sosialisasi dan pelaksanaan program yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat serta pemahaman yang kurang mengenai mekanisme program. Kemudian aspek keberhasilan sasaran memang sudah berjalan cukup baik namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam mewujudkan target sasaran, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sehingga belum optimal. Dan untuk aspek kepuasan program cukup efektif namun masih ditemukan protes dari masyarakat yang merupakan penerima manfaat terkait kualitas material bangunan yang perlu ditingkatkan.

#### **E. Referensi**

Alam, P., Selatan, S., Oktuwar, D., Nurkukuh, D. K., & Priyoga, I. (2021). *Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai Upaya Pengentasan Permukiman Kumuh*. 2(283), 1–10.

- Arafat, A. (2023). *Kebijakan Publik (Teori dan Praktik)*.
- Araujo, C. M., Astuti, W., & Yudana, G. (2023). Faktor Penyebab Permukiman Kumuh di Kawasan Semanggi, Kota Surakarta. *Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, Dan Permukiman*, 5(2008), 155–169.
- Artita, G. V., Cikusin, Y., & Anadza, H. (2024). EFEKTIVITAS PROGRAM TULUNGAGUNG LAYAK HUNI DALAM PEMERATAAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH (Studi Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung). *Respon Publik*, 18(9), 59–66.
- Dr. Kartini Harahap, Nurhayati, Arafat, I. H. (2024). *Buku Ajar, Metode Penelitian*. PT Media penerbit indonesia.
- Hendariwati, H., Fadjarajani, S., & Hilman, I. (2021). *Studi Kasus Di Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut*. 2(1).
- Hertati, D. (2020). *Buku Monograf Efektivitas Full*. CV.Mitra Sumber Rejeki.
- Krisandriyana, M., Astuti, W., & Fitria Rini, E. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Kawasan Permukiman Kumuh Di Surakarta. *Desa-Kota*, 1(1), 24. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v1i1.14418.24-33>
- Mardiansyah, A., & Adisti, N. A. (2020). Analisis Yuridis Pasal 98 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Kajian Terhadap Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Oleh Pemerintah Daerah Dengan Peraturan Daerah). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(4), 451. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i4.594>
- Mariani. (2023). *PELETAKAN BATU PERTAMA PROGRAM PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU (DAK INTEGRASI) KAWASAN ANAIWOI KAMPUNG BAJO KAB. KOLAKA TA 2023*.
- Mesiono. (2018). *Efektivitas Manajemen Berbasis Madrasah /Sekolah*. Perkumpulan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (PPMPI).
- Mutmainah, F., & Husaini, M. (2024). Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Batu Merah dan Desa Lajar). *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(1), 11–19.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi Penelitian Sosial. In *Metodologi Penelitian Sosial*. Penerbit Media Sahabat Cendekia. <https://doi.org/10.11594/ubpress9786232967496>
- Oktuwar, D., Nurkukuh, D. K., & Priyoga, I. (2021). Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai Upaya Pengentasan Permukiman Kumuh di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. *MATRA*, 2, 1–10.
- Panni, T. A., & Hidayat, R. (2024). Efektivitas Program Kotaku di Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 62–68.
- Safrizal, S., Safuridar, S., & Fuad, M. (2021). Mengevaluasi Efektivitas Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Studi Kasus pada Wilayah Kota Langsa). *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 200–213.
- Smith, A. (2016). *Implementasi Kebijakan Persampahan*. Group Penerbit CV. Budi Utama.
- Widodo, A., & UB, A. R. (2023). Efektivitas Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) di Kabupaten Sidoarjo. *Web of Scientist International Scientific Research Journal*, 2(2), 18.